



---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

---

**L A P O R A N**  
**DELEGASI DPR-RI KE SIDANG TAHUNAN KE-21**  
***ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF)***  
**TANGGAL 27 - 31 JANUARI 2013 DI VLADIVOSTOK, RUSIA**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pengiriman Delegasi**

Partisipasi Delegasi DPR-RI ke Sidang Tahunan ke-21 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tanggal 27 – 31 Januari 2013 di Vladivostok, Rusia. didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 33/PIMP/III/2012-2013.

**B. Susunan Delegasi**

Susunan Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan ke-21 APPF adalah sebagai berikut:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM   | Wakil Ketua DPR RI/Ketua Delegasi/<br>F-PDIP |
| 2. Dr. KH. Surahman Hidayat, MA          | Ketua BKSAP/F-PKS                            |
| 3. Sidarto Danusubroto                   | Wakil Ketua BKSAP/ F-PDIP                    |
| 4. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH       | Wakil Ketua BKSAP/ F-PAN                     |
| 5. Ir. H. Azam Azman Natawijaya          | Anggota BKSAP/ /F-PD                         |
| 6. Ir. Idris Sugeng, M.Sc                | Anggota BKSAP/ F-PD                          |
| 7. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ, MBA | Anggota BKSAP/ F-PG                          |
| 8. Dr. H. Muchtar Amma, MM               | Anggota BKSAP/ F-PHanura                     |
| 9. Drs. Hasrul Azwar, MM                 | Pimpinan Fraksi PPP                          |

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI tanggal 18 Oktober 2012 dan surat Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI tanggal 8 November 2012, maka Delegasi

DPR RI menyepakati *joint delegation* dengan Delegasi DPD RI dengan Ketua Delegasi dari DPR RI yaitu Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM.

Sebagaimana pada Sidang-sidang Tahunan APPF sebelumnya, Delegasi Parlemen Indonesia menggunakan bahasa nasional yakni Bahasa Indonesia dalam setiap sesi persidangan ataupun pertemuan.

Selama acara persidangan APPF ke-21, Delegasi Parlemen RI didampingi oleh pejabat dan staf dari Kementerian Luar RI Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik (KIK Aspasaf), pejabat dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi**

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi Parlemen RI ke Sidang Tahunan ke-21 APPF adalah memanfaatkan forum kerja sama APPF yang merupakan salah satu kesempatan bagi Parlemen RI untuk bekerja sama meningkatkan saling pemahaman, melaksanakan kebijakan luar negeri, dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

### **D. Misi Delegasi**

Adapun misi Delegasi Parlemen RI mengikuti Sidang tersebut untuk turut menyuarakan keketuaan Indonesia pada APEC 2013. Dalam hal ini, forum APPF telah menekankan pentingnya forum APEC di kawasan Asia Pasifik dan global sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara kinerja APEC dengan APPF.

### **E. Persiapan Pelaksanaan Tugas**

Sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan ke-21 APPF, Delegasi DPR dan DPD RI telah mengadakan rapat dan diskusi pendahuluan sebagai persiapan sidang. Materi yang diolah menyertakan masukan dari Kementerian Luar Negeri RI. Dalam rapat tersebut telah disepakati pembagian tugas Delegasi DPR dan DPD RI secara proporsional dalam setiap kegiatan persidangan.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. Situasi Umum Persidangan**

Seluruh kegiatan Sidang Tahunan ke-21 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) pada tanggal 27-31 Januari 2013 dilaksanakan di *Far Eastern Federal University (FEFU) Conference Center* Russky Island-Vladivostok, Rusia. Sidang dihadiri oleh 22 dari 27

negara anggota APPF, yaitu Australia, Chile, China, Ekuador, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kosta Rika, Laos, Malaysia, Meksiko, Mikronesia, Mongolia, Papua Nugini, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Brunei Darussalam hadir sebagai *observer*. Sidang juga dihadiri oleh perwakilan dari Afghanistan dan Kazakhstan dan organisasi internasional seperti *United Nations, IPA EurAsEC, PABSEC, IPA CIS, PACE, SCO, dan PA OSCE*.

Sidang terdiri dari rangkaian pertemuan *Executive Committee Meeting, Opening Ceremony, Working Groups, Drafting Committee Meeting, Plenary Session, dan Closing Ceremony*. Rangkaian Sidang APPF diawali dengan *Executive Committee Meeting* yang kemudian dilanjutkan dengan *Plenary Meeting*. Sementara itu di sela-sela *Plenary* diadakan pertemuan-pertemuan *Working Groups* dan *Drafting Committee* guna membahas berbagai rancangan resolusi yang diajukan negara-negara anggota APPF. Selain itu, sebagai agenda tambahan telah diselenggarakan dua kegiatan yaitu *Meeting of the Young Parliamentarians from the Asia Pacific Region* dan *Round Table Asia Pacific – Europe: New Horizons of Cooperation*.

### **Executive Committee Meeting**

*Executive Committee Meeting* dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013 yang diikuti oleh 11 negara anggota *Executive Committee* perwakilan dari 4 kawasan, yaitu Jepang dan China untuk Asia Timur Laut; Indonesia dan Malaysia untuk Asia Tenggara, Selandia Baru dan Mikronesia untuk Oceania; Chile dan Kanada untuk Amerika, dan Rusia sebagai tuan rumah serta Ekuador dan Meksiko sebagai pihak yang mengusulkan permintaan untuk menjadi tuan rumah APPF ke-22 tahun 2014 turut menghadiri pertemuan.

*Executive Committee Meeting* menyetujui beberapa keputusan terkait pelaksanaan serta agenda keseluruhan rangkaian pertemuan APPF. Selain itu, pada pertemuan ini disepakati Meksiko sebagai tuan rumah pertemuan APPF ke-22 pada *Plenary Meeting*, dan *Executive Committee* akan mempertimbangkan proposal Ekuador untuk menjadi tuan rumah APPF ke-23 pada tahun 2015.

### **Opening Ceremony**

Sidang Tahunan ke-21 APPF dibuka secara resmi pada tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.00 di Blue Hall FEFU Conference Center oleh Ketua Konsil Federasi Rusia, **H.E. Ms. Valentina Matvienko** selaku Presiden APPF ke-21. Dalam sambutannya, Ms Valentina Matvienko menyampaikan APPF merupakan forum parlementer terkuat di Asia Pasifik sehingga para anggota parlemen layaknya memanfaatkan forum ini terus mendorong isu-isu strategis yang terus berkembang pada tingkat regional dan global. Beliau juga menyoroti perlunya sistem hubungan antar pemerintahan yang baru di kawasan Asia Pasifik dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian dan keamanan, intensifikasi

pembangunan nasional, mengurangi dampak negatif perubahan iklim, menjamin keamanan pangan dan energy, dan meningkatkan kerja sama regional.

Presiden Rusia, **H.E. Mr. Vladimir Putin** juga menyampaikan sambutannya melalui Menteri Pembangunan Timur Jauh Rusia, **Mr. Viktor Ishaye**, yang menyatakan bahwa APPF merupakan perpanjangan tangan dari APEC dalam dimensi parlementer dimana APPF selama ini telah mengupayakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Selain itu Sekjen PBB, **H.E. Mr. Ban Ki Moon** melalui utusan khususnya, *Under-Secretary General* untuk PBB, **Mr. Yuri Fedotov**, menyampaikan bahwa penjangkauan kepada parlemen merupakan prioritas bagi PBB sehubungan dengan nilai parlemen sebagai perwakilan suara rakyat.. Pada kesempatan tersebut, Presiden Kehormatan APPF, **H.E. Mr. Yasuhiro Nakasone** yang diwakili oleh Ketua Delegasi Jepang, **Mr. Masahiro Imamura** menyampaikan bahwa dengan bergulirnya APPF dibawah *the New Tokyo Declaration* yang disepakati pada APPF-21, maka parlemen harus dapat lebih aktif dalam memberikan kontribusi pada isu-isu regional dan global yang mengemuka.

### **Plenary Meeting**

Setelah Opening Ceremony, dilaksanakan *Plenary Session* yang terbagi ke dalam 4 (empat) sesi agenda utama pembahasan yang telah disepakati pada pertemuan *Executive Committee*, yaitu *Political and Security*, *Economic and Trade Cooperation in Asia Pacific*, *Regional Cooperation in the Asia Pacific*, dan *Future Work of the APPF*. Pada setiap sesi, para Anggota Delegasi membacakan statement-nya.

Pada agenda *Political and Security*, negara-negara anggota APPF menggarisbawahi berbagai perkembangan isu politik dan keamanan di kawasan seperti klaim wilayah antar kawasan, perkembangan di Timur Tengah dan Afrika Utara, situasi di Semenanjung Korea, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, dan kejahatan terorganisir.

Pada agenda *Economic and Trade Cooperation in Asia Pacific*, negara-negara anggota APPF menyampaikan pandangan terkait situasi ekonomi global saat ini, krisis finansial di Eropa, pembangunan infrastruktur transportasi, kerja sama dalam pembangunan inovatif, promosi kerja sama ekonomi dan perdagangan bebas, serta ketahanan pangan. Selain itu, negara-negara anggota APPF menyambut baik laporan penyelenggaraan APEC 2012 yang disampaikan oleh delegasi Rusia.

Pada agenda *Regional Cooperation in Asia Pacific*, negara-negara anggota APPF menyampaikan perkembangan isu-isu terkait dialog peradaban, promosi budaya, pendidikan, dan kemanusiaan, kebijakan pemuda, proses migrasi, ketahanan pangan, dan kerja sama dalam kesiapsiagaan bencana dan perlindungan lingkungan.

Pada agenda *Further Work of APPF*, negara-negara menekan pada implementasi prosedur baru yang dirangkum dalam *Rules of Procedure* berdasarkan *The New Tokyo Declaration* yang telah disepakati pada pertemuan APPF ke-20 di Tokyo, Jepang. Disampaikan bahwa prosedur baru tersebut merupakan *living document* dapat selalu dinilai dari waktu ke waktu untuk efisiensi dan efektifitas. Selain itu, dalam sesi ini, Meksiko secara resmi didaulat sebagai tuan rumah APPF ke-22 dan menjadi Presiden APPF mulai bulan Mei 2013.

Menanggapi isu-isu yang dibahas dalam *Plenary Meeting*, negara-negara anggota APPF berpandangan bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut di atas, diperlukan komitmen global dan kerja sama dalam kerangka multinasional untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penguatan kerja sama di bidang kesiapsiagaan dan penanganan bencana, *confidence building*, keterbukaan antarnegara untuk modernisasi ekonomi, saling tukar pengalaman, dialog politik, ekonomi, serta sosial budaya. Dalam hal ini, parlemen-parlemen negara anggota APPF juga diharapkan dapat memainkan peran dalam mendorong kinerja pemerintah yang efektif dan alokasi anggaran yang tepat dan efisien guna mendukung upaya-upaya tersebut.

## **B. Agenda Sidang**

Agenda yang dibahas dalam Sidang Tahunan ke-21 APPF adalah sebagai berikut:

1. **Political and Security Matters**, meliputi topik-topik:
  - 1.1. Peace and Stability in Asia Pacific: Strengthening of democracy, respect for sovereignty and prospects of building-up a regional collective security system;
  - 1.2. Fighting against terrorism, drug trafficking and organized crime;
  - 1.3. Development in the Middle East and in North Africa: Potential challenges to the global and regional stability
  - 1.4. Parliamentary diplomacy: challenges and perspectives
2. **Economic and Trade Matters in the Asia-Pacific**, meliputi topik-topik:
  - 2.1. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2012 Report by Rusia
  - 2.2. Parliamentary dimension of trade and economic cooperation and integration processes in the Asia-Pacific region, taking into account the WTO aspect
  - 2.3. Development of transport infrastructure and modern logistic centers
  - 2.4. Intensive cooperation for insuring the innovative growth
  - 2.5. Strengthening of food security
3. **Regional Cooperation in the Asia-Pacific**, meliputi topik-topik:
  - 3.1. Dialogue of civilizations, promotion of cultural, educational and humanitarian contacts, harmonization of youth policy, migration processes
  - 3.2. Problems of poverty eradication, sustainable social security in the context of global financial imbalances
  - 3.3. Energy security, energy dialogue and energy efficiency

- 3.4. Cooperation in disaster prevention and disaster management, environmental protection
4. **Future Activities of the APPF**, meliputi topik-topik:
  - 4.1. The result of the first year of the APPF reform process under the new APPF Rules of Procedure
  - 4.2. Date and venue of the 22<sup>nd</sup> APPF Annual Meeting

### **C. Partisipasi Delegasi DPR RI**

Delegasi Parlemen RI berpartisipasi aktif dalam setiap sesi pertemuan baik dalam Sidang Komite Eksekutif, Sidang Pleno, Drafting Committee maupun Working Group untuk merumuskan resolusi APPF. Delegasi juga berpartisipasi aktif dalam *Round table discussion* dan juga pertemuan anggota parlemen muda yang dihelat di sela-sela acara APPF ke-21. Dalam Sidang Pleno, delegasi telah menyampaikan sumbangan pemikiran terhadap beberapa masalah yang menjadi agenda sidang antara lain berkaitan dengan penguatan perdamaian dan keamanan kawasan, memerangi terorisme, perdagangan obat terlarang dan kejahatan terorganisir, situasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, APEC, perspektif keparlemenan dan WTO, ketahanan energi dan pangan, manajemen bencana, dialog lintas-agama, kebudayaan dan peradaban, hingga inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam Drafting Committee dan Working Group, delegasi ikut aktif merumuskan draft resolusi dan telah berupaya memperjuangkan agar semua usulan Indonesia bisa dibahas dan diadopsi sebagai resolusi APPF.

#### **Executive Committee Meeting**

Sidang Executive Committee yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013 pukul 18.00 LT di Conference Hall 3 dipimpin oleh Wakil Ketua Konsil Federasi Rusia Hon. Mr. Ilyas Umakhanov, dan dihadiri oleh 9 Negara Anggota Executive Committee yaitu Canada, Chile, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Micronesia, New Zealand, dan Rusia. Dua negara calon tuan rumah APPF berikutnya Meksiko dan Ekuador juga ikut hadir. Delegasi Parlemen RI diwakili oleh **Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM, Dr. KH. Surahman Hidayat, MA, Sidarto Danusubroto, dan Dr. Laode Ida (DPD RI)**.

Sidang membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain Agenda Sidang ke-21 APPF dan *Programme of Work*. Sidang juga membahas draf-draf resolusi yang diajukan oleh Negara-negara APPF untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Drafting Committee sebelum diadopsi melalui Sidang Pleno. Terhadap draft-draft resolusi dengan topik yang sama yang diajukan oleh lebih dari 1 negara, sebelum dibahas dalam Drafting Committee terlebih dahulu didiskusikan dalam Working Group yang terdiri dari wakil-wakil delegasi negara pengusul, untuk menyatukan persepsi dan merumuskannya menjadi satu draft resolusi. Indonesia mengusulkan 5 draft resolusi yakni:

1. *Draft Resolution on Fighting Against Terrorism, Drug Trafficking and Organized Crime;*
2. *Draft Resolution on the Middle East Peace Process;*
3. *Draft Resolution on Parliamentary Diplomacy;*
4. *Draft Resolution on Strengthening of Food Security;*
5. *Draft Resolution on Dialogue among Civilizations, Cultural Promotion, Educational and Humanitarian Contacts, Youth Policy Harmonization, Migratory Processes.*

Selanjutnya, Sidang juga menetapkan Wakil Ketua Konsil Federasi Rusia **Hon. Mr. Ilyas Umakhanov** sebagai *Deputy Chairman of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation* dengan *Deputy Chairpersons*: **Hon Ms. Svetlana Orlova**, *Deputy Chairperson of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation*; **Hon. Mr Vyacheslav Shtyrov**, *Deputy Chairman of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation*; dan **Hon. Mr Sergey Zheleznyak**, *Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation*.

Wakil Ketua Komite Luar Negeri Konsil Federasi Rusia, **Hon Mr Andrey Klimov**, disepakati menjadi Ketua *Drafting Committee*. *Executive Committee* memberikan mandat kepada *Drafting Committee* untuk membentuk *Working Groups* untuk membahas draf resolusi.

Dalam rapat *Executive Committee* tersebut, pembahasan mengenai keanggotaan *Executive Committee* mengemuka, mengingat beberapa grup sub-region belum menyesuaikan rotasi keanggotaan di *Executive Committee* sesuai dengan *New Rules of Procedure of APPF* yang diadopsi di Tokyo, pada APPF ke-20 tahun lalu. Sesuai Pasal 43 *New Rules of Procedure of APPF*, mandat keanggotaan *Executive Committee* adalah empat tahun dengan separuh anggotanya diganti setiap dua tahun. Untuk menjamin suksesi keanggotaan di *Komite Eksekutif* tersebut, rapat memutuskan agar masing-masing sub-region memiliki anggota baru dengan metode: salah satu dari anggotanya harus berhenti menjabat pada periode tahun ini, sementara yang lainnya akan tetap menjabat hingga dua tahun ke depan.

Dalam rapat, *Komite Eksekutif* juga membahas mengenai proposal Ekuador dan Meksiko sebagai tuan rumah APPF tahun berikutnya. Setelah kedua Negara melakukan perundingan, disepakati bahwa Meksiko menjadi tuan rumah APPF ke-22 tahun 2014 sementara Ekuador menjadi tuan rumah APPF ke-23 tahun 2015. Rapat *Executive Committee* kemudian menyetujui hal tersebut.

### **Sidang Pleno**

Rangkaian Sidang Pleno APPF ke-21 yang berlangsung di *Conference Hall 1* pada tanggal 28 – 30 Januari 2013 dihadiri oleh seluruh Delegasi Parlemen RI.

Sidang Pleno Pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 dipimpin oleh *Chairman of the 21<sup>st</sup> Annual Meeting of the APPF*, **Hon. Mr. Ilyas Umakhanov**, *Deputy Chairman of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation* yang membahas Agenda *Political and Security Matters*. **Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM** selaku Ketua Delegasi Indonesia mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan *statement* tentang topik *Peace and Stability in Asia-Pacific: Strengthening of democracy, respect for sovereignty and prospects of building-up a regional collective security system*. Dalam hal ini delegasi mendesak negara-negara yang tengah terlibat dalam konflik apapun – apakah terkait isu-isu perbatasan atau sejarah tertentu – untuk dapat menahan diri dari setiap penggunaan atau unjuk kekuatan dan lebih mendorong dialog untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Seluruh anggota APPF harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan kondisi yang stabil ke kawasan ini. Indonesia juga menyatakan apresiasinya terhadap suksesnya transisi politik dan suksesi kekuasaan di Asia seperti Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Cina dan Republik Demokratik Korea yang merupakan peluang untuk memperkuat komitmen bersama mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain itu, melalui APEC, Indonesia menekankan perlunya untuk mempromosikan keamanan dan kesempatan ekonomi. Melalui tema APEC 2013: *Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth*, Indonesia hendak menunjukkan bahwa upaya untuk membangun perdamaian dan stabilitas adalah komprehensif, kohesif dan saling terkait dengan aspek lainnya seperti kemakmuran dan kesejahteraan. Perlu ditegaskan kembali *preventive diplomacy* dan pendekatan dengan cara-cara damai sebagai alat terbaik untuk mencegah, menanggulangi dan mengelola konflik demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas melalui partisipasi dan kontribusi aktif anggota APPF di tingkat regional maupun global.

Topik memerangi terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan kejahatan terorganisasi juga menjadi isu yang mendapat perhatian dari Delegasi Parlemen RI. Delegasi Parlemen RI yang diwakili **Sidarto Danusubroto** menyampaikan *statement* yang mengharapkan perlunya Rencana Aksi Regional untuk Strategi Penanggulangan Terorisme sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi bahaya terorisme. Indonesia percaya bahwa program melawan terorisme perlu mendapat perhatian serius oleh negara-negara anggota APPF melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan, dan partisipasi aktif negara anggota APPF dalam isu-isu kontra-terorisme. Selain itu, kerjasama yang lebih komprehensif untuk memberantas perdagangan gelap narkoba diperlukan sebagai alat untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan rencana aksi kontra-terorisme. Negara-negara anggota APPF harus berkolaborasi untuk menghalangi masuknya gerakan teroris ke dalam sistem keuangan dunia, dan menggunakan jejak pendanaan mereka untuk mencari dan menangkap teroris, sesuai dengan Piagam PBB dan Peraturan Internasional. Lebih lanjut, Indonesia menilai bahwa pendekatan dan langkah-langkah komprehensif harus dilakukan dengan meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*), melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 dan 1390 yang mencakup pemblokiran efektif aset teroris, kriminalisasi pendanaan terorisme,



peningkatan upaya penyelidikan dan penuntutan pencucian uang dan pembiayaan teroris, dan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi integritas sistem keuangan dengan mengatur dan mengawasi sektor keuangan sesuai standar internasional. Indonesia telah menerapkan strategi de-radikalisasi sebagai instrumen melawan tindakan teroris atau kontra-terorisme dan berdasarkan dinamika perkembangan terorisme, Indonesia juga telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tanggal 16 Juli 2010. Lebih lanjut, Indonesia juga adalah anggota Grup Asia-Pasifik tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Asia Pacific Group on Money Laundering*), sejenis Gugus Tugas Aksi Finansial (*Financial Action Task Force, FATF*) regional. Indonesia juga memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan secara aktif terlibat dalam kerjasama regional dan global. Selain itu, Indonesia mendukung Strategi Kontra Terorisme Global PBB (*the Global Counterterrorism Strategy of the UN*) dan bersama-sama dengan Amerika Serikat, Indonesia menyetujui kelompok kerja ahli kontraterorisme dalam mekanisme *ASEAN Defense Minister Meeting-Plus (ADMM-Plus)*.

Menanggapi topik tentang *Developments in the Middle East and in North Africa: Potential Challenges to the Global and Regional Stability*, **Dr. KH. Surahman Hidayat, MA** menyampaikan statement bahwa perkembangan situasi di *Middle East and North African (MENA)* tidak diragukan lagi akan mempengaruhi perkembangan wilayah Asia Pasifik. Dampak paling mendasar ketidakstabilan politik di *Middle East and North African* akan menyebabkan ketakutan meluas tentang gangguan pasokan energy dan hal itu akan mempengaruhi kapasitas produktif jangka panjang, memperlambat reformasi harga energi dalam negeri, peningkatan pengeluaran pemerintah dan lain-lain. Negara di Asia Pasifik selayaknya memberikan perhatian akan masalah ini. Gangguan politik di Negara Timur Tengah dan Afrika akan mempengaruhi stabilitas ekonomi global, membahayakan kehidupan rakyat kita yang bermukim di sana, dan membawa kita ke dalam konflik politik jangka panjang yang berasal dari berbagai latar belakang hubungan politik antara Asia Pasifik dan negara-negara MENA. Indonesia sendiri selalu mendukung upaya-upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah dan Asia Pasifik dan menyerukan untuk mengakhiri kekerasan di kawasan tersebut untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih besar lagi serta memilih dialog dan diplomasi untuk memulai proses perdamaian. Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terhadap konflik berkepanjangan di Suriah dan menyerukan untuk mengakhiri kekerasan di Suriah melalui gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan dan membangun dialog politik inklusif yang melibatkan unsur-unsur terkait di Suriah dalam persiapan transisi politik menuju rezim baru serta memulai bekerja dengan iktikad baik menuju perdamaian. Menyinggung mengenai situasi Israel dan Palestina, Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa sulit untuk menyelesaikan konflik, namun jalan menuju perdamaian telah terbentuk. Kebutuhan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah Negara adalah suatu keharusan yang menjadi hasil dari aspirasi sah mereka, dimana memastikan perdamaian jangka panjang dengan negara-negara tetangganya juga memiliki peran penting untuk mengakui prinsip solusi dua-negara (*two-state principles*). Palestina layak memperoleh sesuatu yang telah lama mereka perjuangkan: legitimasi. Meskipun belum diakui sebagai Anggota Penuh PBB, Palestina

telah memenangkan hati mayoritas. Indonesia menyambut baik perkembangan yang terjadi dan terus mendukung upaya terbentuknya Negara Palestina yang bebas dan merdeka. Negara-negara anggota APPF adalah tetangga dekat negara-negara adidaya Asia Pasifik yang dipercaya untuk berhimpun di Dewan Keamanan PBB – baik sebagai anggota permanen atau non-permanen - dan sebagai bagian dari komunitas regional, kita perlu mengambil sikap jujur dan adil tentang masalah ini sekaligus menunjukkan bahwa kita adalah warga dunia.

Dalam pembahasan topik tentang *Parliamentary diplomacy: Challenges and Perspectives*, **H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.** menyatakan bahwa sejalan dengan pertumbuhan globalisasi yang sangat cepat selama dua dekade terakhir, pemahaman anggota parlemen nasional akan isu-isu luar negeri semakin meningkat. Meningkatnya ketergantungan antarnegara dan keragaman serta kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh anggota parlemen nasional membuat kebutuhan akan perluasan peran mereka dalam diplomasi dan hubungan internasional menjadi semakin penting. Entitas parlemen telah muncul sebagai aktor internasional dan melengkapi inisiatif diplomasi tradisional yang dilakukan oleh pemerintah. Parlemen membangun dan memelihara hubungan dengan parlemen lainnya, mulai dari pertukaran informasi secara sederhana sampai kunjungan resmi yang dilakukan secara timbal balik. Indonesia telah membentuk grup kerjasama antar parlemen dengan 59 Parlemen grup kerjasama bilateral. Indonesia juga secara rutin memelihara komunikasi, diskusi, dialog dan kunjungan ke negara-negara tersebut serta mendukung penuh peningkatan keterlibatan parlemen dalam berbagai isu-isu dan masalah internasional.

Sidang Pleno Kedua pada tanggal 29 Januari 2013, dipimpin oleh *Deputy Chairperson*, **Hon. Ms. Svetlana Orlova**, *Deputy Chairperson of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation* dan membahas Agenda *Economic and Trade Matters*. Dalam *statement-nya* terkait topik *Parliamentary dimension of trade and economic cooperation and integration processes in the Asia Pacific region, taking into account the WTO aspect*, Delegasi Parlemen RI yang diwakili oleh **Dodi Reza Alex Noerdin, Lic. Econ, MBA** menyampaikan bahwa Aktivitas perdagangan di dalam dan di antara negara-negara anggota APEC telah tumbuh empat kali lipat dan investasi langsung oleh pihak eksternal di kawasan Asia Pasifik tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya. Setiap negara memiliki tingkat perkembangan sendiri mengenai mekanisme perdagangan, maka itulah sebabnya dalam WTO kita memiliki *Aid for trade, facilitation, technical and economic cooperation* yang keseluruhannya telah menjadi bagian dari pembangunan kebijakan kapasitas perdagangan.

Selanjutnya, Indonesia berharap bahwa momentum APEC 2012 – yang menjadi momentum adopsi *APEC List of Environmental Goods*, salah satu isu pelik dalam WTO - dan ambisi baru kami terhadap *Resilient Asia Pasifik: Engine of Global Growth* pada APEC 2013 akan berlanjut ke Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Bali untuk memberi semangat proses persetujuan Doha Development Agenda. Dalam hal ini, peran anggota parlemen sebaiknya lebih dari sekedar menjalankan fungsi pengawasan dan pelaporan

parlementer saja. Parlemen harus memiliki peran yang lebih luas untuk mereformasi proses-proses dan peraturan-peraturan di WTO. Lebih lanjut, dimensi parlementer bagi WTO akan membantu para anggota parlemen untuk lebih memahami tugas-tugas WTO sehingga para anggota parlemen dapat memiliki pemahaman tentang WTO yang lebih baik dan dapat memberlakukan undang-undang yang tepat di lingkungan parlemen. Indonesia menyarankan kepada APPF untuk mengundang WTO atau badan multilateral lain yang berkaitan dengan agenda topik seperti ini sehingga bisa mempertahankan kelangsungan dialog dan memberikan perspektif parlementer bagi aktivitas organisasi tersebut. Dalam kaitannya dengan peran parlemen Indonesia dalam memberikan perspektif parlementer, Indonesia dan Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi *co-host* pada Bali Session of the Parliamentary Conference on the WTO, yang dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan WTO Ministerial Conference ke-9, pada tanggal 2-5 Desember 2013. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Parlemen RI juga mengundang peserta APPF untuk berpartisipasi pada acara dimaksud.

Anggota Delegasi Parlemen RI, **Drs. H. Muchtar Amma, MM**, mendapatkan kesempatan menyampaikan statement untuk topik *Development of Transport Infrastructure & Modern Logistic Centers* yang menyampaikan bahwa infrastruktur diperlukan tidak hanya sebagai unsur kegiatan ekonomi nasional dan konektivitas domestik tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan masyarakat internasional. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia telah memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur terutama setelah masuknya Indonesia ke zona *investment grade*. Melalui *Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development until the year 2025*, Indonesia memulai sebuah inisiatif pembangunan secara masif. Master Plan ini diproyeksikan akan menelan sekitar US\$ 500 miliar investasi domestik dan asing. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Presiden RI pada forum APEC 2012, Delegasi Parlemen RI juga mengundang sektor swasta di negara-negara APPF untuk menjadi mitra kami dalam melaksanakan Master Plan tersebut. Lebih lanjut, Delegasi Parlemen RI menyatakan bahwa Parlemen memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia mengajak seluruh Anggota APPF mendorong kebijakan investasi yang kondusif bagi sektor publik dan swasta dan yang akan mengakselerasi kemitraan publik-swasta (PPP), reformasi struktural dan kesempatan bisnis lainnya. Sementara itu, untuk mendukung dan mempromosikan iklim usaha yang kondusif bagi investasi infrastruktur, pada tahun lalu, DPR RI telah mengesahkan berbagai Undang-Undang terkait seperti Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Umum yang mengatur secara komprehensif dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan untuk pembebasan lahan dalam hal pengembangan infrastruktur publik. Selanjutnya, pada tahun 2013, DPR RI akan membahas beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang penting bagi kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat domestik seperti: RUU tentang Jalan, RUU tentang Tanah, RUU tentang perubahan Undang-undang Jasa Konstruksi, RUU tentang Zona Pariwisata Khusus, dan lain-lain.

Pada pembahasan agenda topik *Intensive Cooperation for Insuring the Innovative Growth*, **Ir. H. Azam Azman Natawijaya**, menyampaikan bahwa pada tahun 2012, anggota APEC telah mengambil langkah penting untuk mendorong pertumbuhan yang inovatif melalui upaya untuk mengembangkan kebijakan inovasi yang efektif, non-diskriminatif dan berbasis pasar serta perbaikan visi kita dalam kerjasama inovasi dan jaringan di kawasan. Dengan keyakinan ini, APEC mendorong APEC Growth Strategy yang bertujuan antara lain untuk menciptakan pertumbuhan yang inovatif. APEC berkepentingan untuk dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang dapat mendorong inovasi dan sektor-sektor ekonomi baru. Terkait hal ini, pada tahun 2010 Indonesia telah menyusun Sistem Inovasi Nasional dan membentuk sebuah komite yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi nasional tersebut kemudian didukung oleh rangkaian kebijakan insentif pada sistem penelitian, insentif pajak, dan insentif bagi para peneliti. Indonesia telah mendirikan banyak pusat penelitian di seluruh negeri. Beberapa telah mendapat pengakuan internasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendapat penilaian dari World Rank Research Center sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Indonesia juga mendukung kerjasama APEC dalam mempromosikan pengembangan sumber daya manusia termasuk dengan memperkuat kerjasama antara para inovator dari negara-negara ekonomi APEC, memfasilitasi partisipasi perempuan dan pemberdayaan ekonomi inovatif, memberikan apresiasi kepada para wirausaha muda / ilmuwan melalui *APEC Science Prize for Innovation, Research and Education (ASPIRE)* dan dalam bentuk lainnya sebagaimana tercantum dalam *20th APEC Leaders' Declaration Towards Innovative Growth*. Melalui APEC, Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan tujuan mencapai pertumbuhan inovatif dengan *mentransformasikan Industrial Science and Technology Working Group* menjadi *Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI)* untuk merangkul tiga kelompok pemangku kepentingan inovasi yakni bisnis, pemerintah dan akademisi agar bersama mengatasi tantangan untuk meningkatkan kemampuan inovasi.

Adapun untuk topik *Strengthening of Food Security*, **Drs. H. Mudaffar Sjah, Bc., HK** (DPD RI) menyampaikan bahwa krisis global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan pangan dunia. Kondisi iklim yang ekstrim juga telah mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan sehingga perlu diatasi secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan oleh karenanya upaya terpadu diperlukan di segala tingkat kerja sama, termasuk upaya global dan regional untuk menguatkan keamanan pangan. Indonesia dalam upayanya mencapai ketahanan telah mengambil beberapa kebijakan dalam negeri seperti menyusun UU Pangan, menyediakan USD\$ 890 juta dalam bentuk pinjaman pada tahun 2011 untuk para petani dan koperasi petani sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan petani dan populasi pedesaan ke dalam strategi inklusi keuangan. Sebagai tuan rumah dan Ketua APEC 2013, Indonesia juga meletakkan isu keamanan pangan sebagai agenda utama, untuk kemudian ditindaklanjuti dan dikembangkan pada tahun 2013 untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang merata serta mendorong kemitraan antara petani, pemerintah dan sektor swasta, khususnya petani kecil, yang merupakan 87% dari jumlah seluruh petani di Asia. Lebih lanjut,

Indonesia menekankan pentingnya pembentukan *Asia-Pacific Grain Security System*, sebagai bentuk bantuan kemanusiaan regional untuk Negara-negara anggota yang terkena dampak bencana dan juga mendorong masyarakat internasional untuk melakukan tindakan nyata dalam mencapai ketahanan pangan global. Hal ini sangat penting untuk mendorong kemitraan antara negara maju dan negara berkembang dalam mendiskusikan peluang untuk membentuk pendanaan internasional dalam mendukung upaya pembangunan pertanian

Sidang Pleno Ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 sore hari dan 30 Januari 2013, dipimpin oleh *Deputy Chairperson, Hon. Mr. Vyacheslav Shtyrov, Deputy Chairman of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation* dan membahas Agenda *Regional Cooperation in Asia Pacific*.

Pada Pleno ini, **H. Hazrul Azwar, MM** menyampaikan *statement* untuk topik *Dialogue of Civilizations, Promotion of Cultural, Educational and Humanitarian Contacts, Harmonization of Youth Policy, Migration Process*. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, perbedaan dan persepsi yang salah antar budaya dan agama yang telah lama ada perlu diatasi. Oleh karena itu, Indonesia mendukung gagasan dialog antar peradaban. Indonesia menghimbau agar anggota Parlemen harus berperan aktif dalam mempromosikan dialog antar penganut agama, budaya, dan peradaban yang berbeda. Dalam politik, Delegasi Indonesia sangat mendukung keterlibatan yang lebih besar dari kaum muda melalui pendidikan, bimbingan, dan pelatihan kader muda. Dengan keterlibatan mereka, tidak hanya pembangunan yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, akan tetapi juga proses demokratisasi. Pada tahun 2009, DPR RI telah mengesahkan UU Kepemudaan, dan pada tahun 2011, Indonesia mengesahkan peraturan tentang pemberdayaan pemuda yang mendorong kewirausahaan pemuda. Indonesia juga menyerukan adanya peningkatan upaya bersama untuk mendukung agenda global dalam isu sosial-budaya yang merupakan tanggung jawab para anggota Parlemen untuk menciptakan akses yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja agar dapat berinteraksi satu dengan lainnya secara bebas dan positif berdasarkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya mereka.

Pada topik *Problems of Poverty Eradication, Sustainable Social Security in the Context of Global Financial Imbalances*, Delegasi Parlemen RI yang diwakili **Ir. Idris Sugeng, M.Sc** menyatakan satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kemampuan untuk memberikan jaminan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Visi Indonesia dalam *APEC Bogor Goals* mencerminkan mimpi pemberantasan kemiskinan dan mengatasi ketidakseimbangan keuangan global. Para Pemimpin APEC dalam pertemuan terakhir mereka di kota Vladivostok tahun 2012 telah berkomitmen untuk memperkuat permintaan domestik, memfasilitasi penciptaan lapangan kerja, mengurangi defisit publik yang tinggi dan hutang, dan melaksanakan reformasi struktural untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebagai anggota Parlemen, anggota APPF dapat mendukung misi ini dengan menyediakan kerangka kerja legislative, antara lain untuk mendistribusikan manfaat dari pertumbuhan regional kepada rakyat di negara masing-masing, memperkuat

dan mempromosikan kapasitas usaha kecil dan menengah dan daya saing mereka, mengurangi defisit publik yang tinggi dan hutang, dan memperkecil defisit fiskal. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan sosial secara berkelanjutan dengan melaksanakan jaminan sosial yang mencakup 50% jumlah penduduk dan menargetkan jaminan sosial tercakup secara keseluruhan pada 2019 sebagaimana dimandatkan melalui UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang disahkan oleh DPR RI tahun 2011. Sistem asuransi kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional dan tidak terpisahkan sehingga mampu menjamin setiap warga negara untuk memperoleh akses jaminan sosial yang mudah dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Terkait sub topik *Energy security, energy dialogue and energy efficiency*, Delegasi Parlemen RI, **Muhammad Gazali, Lc** (DPD RI), dalam *statement*-nya menyampaikan bahwa Seiring berjalannya waktu, ketersediaan energi terutama bahan bakar fosil semakin berkurang dan oleh karena itu, dituntut usaha untuk menemukan sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha pencarian tersebut harus tetap memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan seperti pencemaran lingkungan global. Indonesia menyadari bahwa ketahanan energi merupakan faktor penting untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Terkait hal tersebut, Indonesia ingin menggarisbawahi beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan peran energi yang terbarukan dan energi alternatif lainnya untuk kegiatan industri; kedua, memudahkan proses transfer teknologi hijau dari negara maju ke negara berkembang; ketiga, pentingnya memberikan insentif dalam rangka memajukan industri hijau; dan keempat, mendorong para pelaku industri transportasi yang terkemuka dan para teknisi mesin untuk mengembangkan, memproduksi, dan membuat teknologi hijau yang terjangkau dan tersedia untuk pasar internasional. Indonesia sebagai salah satu penyedia energi alternative paling potensial, telah mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya peningkatan penggunaan energi alternative, antara lain pemberian insentif kepada investor di bidang energi dan menetapkan peraturan yang tepat untuk menjamin pertumbuhan konsumsi energi-terbarukan domestik. Selanjutnya, Indonesia berharap forum-forum internasional seperti APPF dapat merumuskan resolusi yang dapat diwujudkan dalam tataran praktek dalam mengembangkan energi alternatif yang lebih efisien dan terjangkau untuk semua.

Sementara dalam isu *Cooperation in disaster prevention and disaster management, environmental protection*, **Pardi** (DPD RI) menyampaikan *statement* bahwa menyadari akan keadaan wilayah Indonesia yang rawan terhadap ancaman berbagai bencana alam, Pemerintah Indonesia terus mengembangkan kapasitas sistem nasional penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan peran militer (Tentara Nasional Indonesia). Indonesia juga telah menyusun mekanisme Pengurangan Risiko Bencana untuk dijalankan di sepuluh provinsi dan beberapa daerah. Di tingkat regional, Indonesia juga telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan mekanisme regional pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk the *ASEAN Agreement on Disaster Management and*

*Emergency Response (AADMER)* dan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre)*. Upaya Indonesia dalam menerapkan manajemen bencana telah diakui oleh dunia internasional antara lain melalui penghargaan "*Global Champion on Disaster Risk Reduction*" yang pertama yang diserahkan pada kesempatan *the 3 Global Platform on Disaster Risk Reduction* di Jenewa bulan Mei 2011. Pada pertemuan APEC 2013 yang akan datang, Indonesia juga mengusulkan isu "Policy Dialogue on the Emergency Response Travel Facilitation" – sebuah inisiatif untuk memfasilitasi mobilitas para petugas penanggulangan bencana diantara negara-negara pada saat terjadinya bencana alam – yang mengumpulkan semua working group terkait. Dengan dibahasnya isu ini, Indonesia berharap kerjasama internasional antar negara dalam upaya penanganan bencana bias semakin berkembang.

Sidang Pleno Keempat dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013 sore hari, dipimpin oleh *Deputy Chairperson, Hon. Mr. Sergey Zheleznyak, Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation*. Sidang membahas *Agenda Further activities of the APPF*.

Pada Pleno tersebut, Delegasi Parlemen RI yang diwakili **Dr. KH. Surahman Hidayat, MA** menyampaikan statement tentang topik *the result of the year of the APPF reform process under the new APPF Rules of Procedure*. Disampaikan bahwa Indonesia menyambut baik reformasi yang terjadi berlandaskan *New Rules of Procedure of APPF* dan juga adopsi *New Tokyo Declaration* yang mencerminkan upaya APPF untuk beradaptasi dengan tantangan abad ke-21. Indonesia menyebutnya sebagai "terobosan dalam mekanisme diplomasi parlementer". Berdasarkan pengamatan Delegasi Indonesia, *New Rules of Procedure* menggarisbawahi dua prinsip dari forum ini yaitu: 1) komitmen untuk dialog yang jujur dan konstruktif dan 2) saling menghormati pandangan dari para peserta. Dengan adanya *New Rules of Procedure*, anggota-anggota APPF dapat memiliki cara-cara yang terukur untuk mengimplementasikan secara nyata resolusi-resolusi yang diadopsi pada Sidang Tahunan dan melalui *New Rules of Procedure* ini pula, diharapkan adanya keterwakilan kawasan dalam setiap kepemimpinan alat kelengkapan APPF. Sehubungan dengan itu, Indonesia menanti adanya penyempurnaan lebih lanjut dari prosedur APPF untuk meningkatkan kinerja organisasi ini dan memberikan yang terbaik dalam diplomasi parlemen.

### **Drafting Committee**

Rapat *Drafting Committee* digelar secara paralel sejak dimulainya Sidang Pleno ke-1 tanggal 28 Januari 2013 dipimpin oleh Hon. Mr. Andrey Klimov, Wakil Ketua Komite Luar Negeri Konsil Federasi Rusia. *Drafting Committee* membahas 35 draf resolusi yang diusulkan oleh Australia, Ekuador, Kanada, Chile, Indonesia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia. Delegasi Parlemen RI diwakili oleh **Dr. KH. Surahman Hidayat, MA, Dr. Laode Ida (DPD RI), Dodi Reza Alex Noerdin, Lic. Econ, MBA, dan H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH**. *Drafting Committee* menyepakati membentuk sedikitnya 11 *Working Group*

untuk membahas draf-draf resolusi yang memiliki judul, tema, topik maupun tujuan yang serupa. *Working Group* berfungsi sebagai sarana agar negara pengusul draft resolusi dengan topik yang sama dapat duduk bersama menyatukan persepsi dan pandangan sehingga bisa menghasilkan 1 (satu) draft resolusi yang kemudian dibahas dalam *Drafting Committee*.

## **Working Groups**

Delegasi RI sebagai pengusul 5 (lima) draft resolusi, tergabung dalam lima *Working Group* bersama dengan delegasi negara pengusul lainnya. 5 *Working Group* tersebut adalah *Working Group* terkait *The Middle East Peace Process; Fighting against Terrorism, Drug Trafficking and Organized Crime; Parliamentary Diplomacy; Strengthening of Food Security; Dialogue among Civilizations, Cultural Promotion, Educational and Humanitarian Contacts, Youth Policy Harmonization, Migratory Processes*.

### **1. Working Group on the Middle East Peace Process**

Delegasi Indonesia dalam *Working Group on the Middle East Peace Process* diwakili oleh **Dr. Laode Ida** (DPD RI) dan **Dody Reza Alex Noerdin**, pada pertemuan pertama di Ruang 7, level 2, Building 20, FEFU, tanggal 28 Januari, pukul 16.30. Karena sifat *Working Group* yang terbuka, selain dua negara pengusul draf resolusi, yakni Jepang dan Indonesia, negara lain yang tertarik untuk berdiskusi soal draf resolusi terkait dapat bergabung. Dalam hal ini, Kanada, Mikronesia, Rusia, China, ikut bergabung dalam diskusi draf resolusi tersebut.

Pembahasan draf resolusi berlangsung alot. Kanada menyatakan keberatan adanya pembahasan draf resolusi tentang Timur Tengah tersebut dengan alasan kawasan Timur Tengah bukan merupakan bagian dari Asia Pasifik. Alasan yang selalu disampaikan dalam setiap pertemuan tahunan APPF tersebut mendapatkan dukungan dari Mikronesia, yang menjadi sekutu Kanada dalam diskusi tersebut.

Jepang menyatakan pembahasan perlu dilanjutkan mengingat ada alasan ekonomi termasuk suplai pasokan energi dari Timur Tengah yang dapat terganggu bila perhatian Asia Pasifik tidak menuju ke kawasan tersebut. Indonesia menekankan perlunya draf tersebut dengan pertimbangan isu tersebut bukan lagi menjadi isu kawasan, tetapi dunia, dan juga menunjukkan perhatian kawasan melalui alasan kemanusiaan. Dukungan untuk perlunya draf resolusi tersebut juga disampaikan oleh China dan Rusia.

Kanada lebih lanjut menyampaikan alasan bahwa kesepakatan mengenai Timur Tengah juga telah disetujui dalam APPF ke-20 dan sebelumnya. Kanada akan menyatakan sepakat dengan draf resolusi Timur Tengah, bila pembahasan yang ada menggunakan resolusi Timur Tengah yang disepakati pada APPF ke-20, Tokyo, Jepang. Indonesia, Jepang, Rusia dan China menolak hal tersebut dengan alasan perkembangan terbaru



kawasan Timur Tengah perlu direspon dengan bijak oleh APPF. Pertemuan akhirnya ditutup tanpa kesepakatan dan akan dilanjutkan pada pukul 09.00 hari berikutnya 29 Januari.

Pada pertemuan berikutnya, Delegasi Indonesia diwakili oleh Yth Sdr. Surahman Hidayat. Dengan pandangan bahwa draf resolusi Timur Tengah perlu untuk diadopsi di APPF, Indonesia menyepakati saran Kanada untuk menjadikan resolusi APPF ke-20 tentang Timur Tengah sebagai landasan diskusi dengan tambahan beberapa hal. Jepang juga akhirnya mengungkapkan bila posisi prinsipil mereka telah terakomodasi dalam resolusi APPF ke-20.

Untuk merespon perkembangan terbaru seperti naiknya status Palestina sebagai negara observer di PBB dan juga penahanan anggota Parlemen Palestina oleh Israel, Indonesia mengusulkan penambahan paragraf untuk mengakomodasi hal tersebut. Delegasi negara lainnya menyetujui tambahan paragraf untuk mengakomodasi perkembangan terbaru Timur Tengah, sementara mengenai paragraf soal tahanan anggota Parlemen Palestina belum disepakati karena terlalu spesifik. Indonesia, dengan persetujuan bersama dalam kesempatan tersebut kemudian memasukkan frasa *"welcoming the latest development on the issue of Israel and Palestine within the perspective of peace under the UN framework"* pada paragraf preambule pertama sebagai bagian tegas dari pengakuan Parlemen anggota APPF terhadap perkembangan signifikan isu tersebut. Para peserta Working Group pada akhirnya sepakat terhadap draf resolusi hasil diskusi untuk diajukan ke Drafting Committee.

## **2. Working Group on Fighting against Terrorism, Drug Trafficking, and Organized Crime**

Diskusi mengenai draf resolusi ini dilakukan pada 29 Januari, 16.30 dengan peserta dari Australia, Indonesia dan Meksiko. Indonesia diwakili oleh **Dr. Laode Ida** (DPD RI). Diskusi mengenai draf resolusi ini berlangsung cukup singkat karena seluruh delegasi memiliki kesamaan pandangan mengenai hal-hal yang perlu diperjuangkan. Peserta rapat kemudian menyepakati agar draf resolusi tersebut diajukan ke *Drafting Committee* dengan perubahan judul resolusi menjadi: *Combating Terrorism, Drug Trafficking, Human Trafficking and Organised Crime*.

## **3. Working Group on Parliamentary Diplomacy**

Pembahasan mengenai topik draf resolusi *Parliamentary Diplomacy* dilakukan bersama Meksiko pada 29 Januari, pukul 16.30. Hadir mewakili Indonesia adalah **Andi Anzhar Cakra Wijaya**. Namun dalam kesempatan diskusi, Delegasi Kanada, Singapura dan perwakilan dari Rusia juga mengikuti dan menyampaikan masukan untuk menyempurnakan draf resolusi tentang *Parliamentary Diplomacy*.

Dari pembahasan awal, sedikitnya 70% butir-butir resolusi yang ada dalam draf resolusi usulan Indonesia telah terakomodasi di *consolidated draft* yang disusun atas inisiatif

perwakilan dari Rusia. Indonesia hanya menambahkan landasan formal mengenai eksistensi diplomasi parlemen dan kerja parlemen dalam isu-isu internasional yang tersirat melalui Resolusi PBB 66/261 on *Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union* dalam paragraf preambule. Usulan tersebut disetujui oleh Meksiko, sembari Meksiko mengusulkan perlunya pakar-pakar hukum internasional untuk bertemu dan menyiapkan semacam Piagam Parlemen untuk landasan diplomasi parlemen. Meskipun usulan Meksiko tersebut merupakan hal yang rumit dalam pelaksanaannya, Indonesia dengan pertimbangan hal tersebut merupakan gagasan yang menarik akhirnya menyetujui usulan Meksiko tersebut. Para peserta diskusi dalam *Working Group* akhirnya menyepakati draf resolusi *Parliamentary Diplomacy* untuk disetujui dalam *Drafting Committee*.

#### **4. Working Group on Strengthening of Food Security**

*Working Group* mengenai *Food Security* digelar pada 28 Januari, ruang 8, level 2, Building 20, FEFU, pukul 16.30. Delegasi yang hadir dalam diskusi tersebut adalah dari Indonesia, Australia, Kanada, Rusia dan Ekuador. **Drs. H. Muchtar Amma, MM** mewakili Indonesia dalam sesi tersebut. Diskusi dalam sesi ini sempat diwarnai dengan perdebatan kecil mengenai apakah perlu menggunakan terminologi *food security* (ketahanan pangan) atau *food sovereignty* (kedaulatan pangan) dalam draf resolusi tersebut. Ekuador bersikukuh terminologi *food sovereignty* harus masuk dalam draf resolusi. Jalan tengah kemudian diberikan dengan mencantumkan terminologi *food sovereignty* dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma perdagangan bebas dan kewajiban di dalam WTO.

Sejumlah usulan prinsip Indonesia seperti *capacity building*, dan juga tindak lanjut sejumlah kebijakan khusus pangan yang disepakati di level APEC diadaptasi sedemikian rupa dalam isi draf resolusi dimaksud. Para delegasi akhirnya sepakat draf resolusi tentang *Food Security in Asia Pacific* dimintakan persetujuannya di *Drafting Committee*.

#### **5. Working Group on Dialogue among Civilizations, Cultural Promotion, Educational and Humanitarian Contacts, Youth Policy Harmonization, Migratory Processes**

*Working Group* draf resolusi topik ini dimulai pada pukul 09.00 ruang 6, level 2, Building 20, FEFU, tanggal 29 Januari. Hadir dari Indonesia **Andi Anzhar Cakra Wijaya**, dan delegasi lainnya dari Meksiko serta Kanada. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia ikut hadir dan menyumbangkan saran dan masukannya.

Delegasi Indonesia dalam kesempatan tersebut berhasil memasukkan *event* yang diprakarsai Indonesia pada 2012, yakni *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue* sebagai salah satu forum yang dianggap perlu untuk mendukung upaya dialog antar-agama, peradaban maupun kebudayaan. Langkah tersebut menunjukkan peran aktif DPR RI untuk mendukung dialog antarperadaban didukung di level kawasan Asia

Pasifik. Indonesia bahkan menekankan perlunya even tersebut ditindaklanjuti melalui forum-forum lainnya yang serupa.

Perdebatan cukup hangat terjadi ketika kemudian menyangkut persoalan migran. Rusia yang diwakili pihak Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa kerangka perundang-undangan yang mengakomodasi hak migran mendapatkan pendidikan di negara dia tinggal merupakan hal yang kontroversial. Langkah tersebut susah dilakukan, mengingat kesepakatan di level antarnegara pun masih sulit ditempuh. Isu migran yang diusulkan Meksiko tersebut menurut anggota Parlemen Meksiko sejatinya merupakan isu bersama yang dihadapi banyak negara.

Indonesia memberikan pandangan bahwa domain legislatif adalah membuat undang-undang. Memberikan jaminan legislatif untuk hak pendidikan bagi migran sepanjang diatur melalui legislasi masih dapat menjadi kewenangan parlemen, mengingat Indonesia juga memiliki banyak migran yang bekerja di luar negeri. Indonesia mengusulkan penambahan frasa *equal in and easy access to* dalam kalimat *...with the view to protect and respect rights to ...* (paragraf operatif no 6), untuk menjustifikasi hak dasar semua manusia adalah sama, termasuk dalam bidang pendidikan. Usulan tersebut disepakati oleh seluruh peserta rapat.

Kanada juga mendukung masuknya usulan penyetaraan sertifikasi level sekolah dan ijazah sekolah di kawasan Asia Pasifik. Usulan Meksiko yang sebelumnya tidak masuk dalam draf resolusi tersebut disetujui para peserta sebagai bagian draf resolusi terkait. Draf tersebut kemudian disepakati untuk disetujui di level *Drafting Committee*.

Pada *Drafting Committee* lanjutan, seluruh draf resolusi yang telah disepakati dalam *Working Group* ditinjau kembali oleh para peserta *Drafting Committee*. Beberapa delegasi memberikan catatan perbaikan penulisan, huruf, maupun tata bahasa. Lima dari 14 resolusi yang disponsori Indonesia bersama Negara lain telah lolos diadopsi di *Drafting Committee*.

### **Round Table Discussion (RTD) tentang Asia Pacific-Europe: New Horizons of Cooperation dan Meeting of the Young Parliamentarians from the Asia Pacific region**

Pada tanggal 30 Januari 2013, di sela-sela persidangan, format pertemuan baru digelar oleh Rusia dalam APPF dalam bentuk *Round Table Discussion (RTD) tentang Asia Pacific-Europe: New Horizons of Cooperation* dan *Meeting of the Young Parliamentarians from the Asia Pacific region* yang berlangsung secara paralel. Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam kedua acara baru yang digelar di sela-sela APPF tersebut.

**Azam Azman Natawijaya** hadir mewakili Indonesia dalam *Round Table Discussion* tentang *Asia Pacific-Europe: New Horizons of Cooperation*. Pertemuan dihadiri oleh negara anggota APPF, *observer*, negara tamu, dan perwakilan dari organisasi internasional.

Pertemuan telah membahas bahwa wilayah Eropa dan Asia Pasifik memiliki kepentingan bersama khususnya dalam kerja sama ekonomi. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah *Final Statement* yang berisi mengenai: perlunya kerja sama yang lebih luas terhadap dialog Asia Pacific Region (APR) dan Eropa dalam berbagai level, antarnegara, kawasan dan individual; memprioritaskan inisiatif untuk menjadikan RTD sebagai bagian dari sesi tahunan APPF dengan melibatkan perwakilan organisasi-organisasi parlemen internasional; mempertimbangkan untuk mengadakan forum pertemuan dari organisasi-organisasi parlemen dalam level global.

Sementara itu, **Dody Reza Alex Noerdin** menghadiri *Meeting of the Young Parliamentarians from the Asia Pacific Region* yang membahas peran penting pemuda dalam pembangunan sehingga pemuda harus terus diberdayakan. Diharapkan agar kita secara efektif dapat membina dan memanfaatkan potensi pemuda melalui program-program terkait kepemudaan di tingkat regional maupun global. Dalam kesempatan tersebut Dody Reza menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif para anggota parlemen muda dari Asia Pasifik untuk mewujudkan sebuah portal internet sebagai sarana komunikasi anggota parlemen muda dari Asia Pasifik. Beliau juga menyampaikan bahwa peran pemuda sangat vital di Indonesia bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Semangat persatuan dikobarkan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, sementara pada era reformasi, para pemuda menjadi penggerak roda reformasi. Indonesia memiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengakomodir dan mendorong gerakan-gerakan pemuda semakin aktif dalam kehidupan sosial dan bangsa.

Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah *Message from the participants in the meeting of young parliamentarians from the Asia-Pacific region*, yang antara lain berisi: permintaan kepada para ketua-ketua delegasi, anggota parlemen muda dan komunitas pemuda dari negara-negara APPF untuk mendukung inisiatif menyelenggarakan pertemuan pemuda tersebut sehingga menjadi kegiatan reguler dari sesi tahunan APPF; inisiatif untuk menciptakan portal internet universal yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara anggota parlemen muda dan para pemimpin muda negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan juga pertukaran informasi dan praktik legislasi terbaik (inovasi) di bidang kebijakan kepemudaan.

### **Bilateral Meeting**

Delegasi Parlemen RI, diwakili oleh **Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM, KH. DR. Surahman Hidayat**, dan **Sidarto Danusubroto** telah mengadakan *bilateral meeting* dengan *Deputy Chairman of the State Duma, Mr. Zheleznyak Sergey*, yang didampingi oleh *Councillor of the Department for International Cooperation, Mrs. Kuzmina Irina*, pada tanggal 29 Januari 2013. Poin-poin yang diangkat dalam pertemuan antara lain:

- a. Kerja sama ekonomi

Rusia dan Indonesia menghendaki peningkatan perdagangan dan investasi kedua negara. Saat ini volume perdagangan Rusia-Indonesia terhitung 2,5 milyar USD. Diharapkan volume perdagangan ini dapat menjadi 5 milyar USD pada tahun 2015

b. Kerja sama militer

Indonesia menyampaikan keinginan untuk terus melakukan kerja sama militer dengan Rusia khususnya untuk pembelian alat-alat militer. Rusia menyambut baik kerja sama militer tersebut.

c. Tragedi Sukhoi

Rusia menyampaikan pula mengenai tragedi jatuhnya pesawat penumpang Sukhoi dalam uji coba di Indonesia. Rusia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya dalam proses investasi tragedi dimaksud, dan kepercayaan untuk melanjutkan kerjasama.

d. Kerja sama sosial dan budaya

Rusia berpendapat bahwa Indonesia merupakan tujuan wisata yang sangat digemari oleh masyarakat Rusia. Di lain pihak, Indonesia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan jumlah pelajar Indonesia untuk studi di Rusia khususnya untuk studi ilmu industri, teknik, dan metalurgi

e. Keketuaan pada APEC dan G20

Kedua negara menyatakan saling dukung atas keketuaan Rusia di G20 dan keketuaan Indonesia pada APEC 2013

### **Pertemuan Executive Committee Sub-region Southeast Asia**

Sementara terkait rotasi keanggotaan *Executive Committee* dari Sub-region Asia Tenggara, pasca penutupan Sidang APPF ke-21 pada tanggal 30 Januari 2013, sebuah rapat konsultasi atas prakarsa Indonesia digelar di *Conference Hall 3*. Rapat Konsultasi yang dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) digelar untuk menindaklanjuti keputusan *Executive Committee* yang merekomendasikan masing-masing sub-region menyesuaikan dengan pasal 43 *New Rules of Procedure of APPF* dengan metode suksesi: salah satu dari anggota *Executive Committee* saat ini harus berhenti menjabat, sementara yang lainnya akan tetap menjabat hingga dua tahun ke depan.

Atas kesepakatan secara aklamasi, Indonesia terpilih untuk kembali menjabat sebagai anggota *Executive Committee* APPF selama dua tahun ke depan demi kontinuitas keanggotaan dari subregion Asia Tenggara. Sementara Kamboja terpilih untuk masa jabatan empat tahun menggantikan Malaysia, dengan kesepakatan metode rotasi jabatan urutan alfabet (*alphabetical order*). Namun, ketika urutan abjad jatuh pada huruf I dan M, Indonesia dan Malaysia bersedia untuk tidak menjabat selama 1 putaran. Setelah itu di putaran selanjutnya, barulah abjad dapat dilanjutkan tanpa tunda.

## **D. Hasil-hasil yang dicapai**

Setelah melakukan pembahasan terhadap agenda sebagaimana tersebut di atas melalui sidang-sidang dengan perdebatan yang cukup hangat dan panjang, pada Pleno ke-5 Sidang Tahunan ke-21 APPF, secara konsensus seluruh peserta Sidang menyetujui dan menandatangani *Joint Communique* yang menjadi hasil pelaporan dari keseluruhan acara pertemuan dan 14 (empat belas) resolusi. Disepakati pula bahwa Pertemuan APPF ke-22 akan diadakan di Puerto Vallarta, Meksiko pada 12-16 Januari 2014.

Dari uraian tersebut di atas, secara singkat hasil-hasil Sidang Tahunan yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang disahkan antara lain sebagai berikut:

#### *Political and Security Matters*

APPF mengimbau pemerintah dan parlemen Asia Pasifik untuk memprioritaskan perwujudan kerangka legal atas keamanan untuk memperkuat perdamaian dan keamanan kawasan. APPF juga memperbarui komitmen mereka untuk mendukung demokrasi yang kuat, institusi-institusi demokrasi, tata kelola yang bertanggung jawab dan masyarakat sipil yang kuat di kawasan. APPF juga berkomitmen kembali untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan dalam berbagai upaya yang tidak konsisten dengan Piagam PBB terhadap kemerdekaan politik maupun integritas wilayah Negara manapun dan untuk tidak mendukung ataupun mengambil tindakan apapun yang bertujuan menumbangkan pemerintahan yang sah atau mengganggu stabilitas Negara lainnya. APPF juga menegaskan bahwa manajemen yang efektif terhadap isu-isu regional perlu didukung oleh institusi-institusi regional yang kuat dan transparan seperti ASEAN, ASEAN Regional Forum, Asia Cooperation Dialogue (ACD), Asia-Europe Meeting (ASEM), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), dan lain sebagainya.

#### *Combating Terrorism, Drug Traffic, Human Trafficking and Organized Crime*

APPF mendesak seluruh Negara anggota untuk mempercepat proses akses dan implementasi yang efektif atas konvensi pemberantasan terorisme PBB dan protocol-protokolnya. APPF mengimbau untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah regional dan internasional untuk meningkatkan landasan hukum nasional dan internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme. APPF juga mengimbau Negara-negara yang belum meratifikasi UN Convention against Transnational Organized Crime and its protocols untuk segera meratifikasinya. APPF juga mendorong kerja sama dalam kerangka APPF untuk mewujudkan undang-undang yang memberantas perdagangan manusia dan juga kejahatan transnasional lainnya.

#### *The Middle East Peace Process*

APPF mengkonfirmasi resolusi APPF ke-20 tentang *The Middle East Process* sekaligus menyambut perkembangan terbaru dari isu Israel dan Palestina dalam perspektif perdamaian melalui kerangka PBB. APPF juga mendesak kedua Negara untuk kembali ke jalur perdamaian. APPF juga mendesak kedua Negara untuk menghentikan penggunaan kekerasan, dan penghentian jangka panjang kekerasan tanpa syarat apapun. APPF juga mendesak seluruh pihak untuk meningkatkan status humanitarian di jalur Gaza.

### Parliamentary Diplomacy

Terinspirasi oleh Resolusi PBB 66/261 tentang *Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union* dan resolusi-resolusi PBB lainnya yang relevan dan juga dokumen-dokumen yang mengakui kontribusi parlemen terhadap negosiasi multilateral melalui pengawasan keputusan dan aktivitas dari institusi-institusi multilateral, APPF kemudian mengenai diplomasi parlemen sebagai unsur komplementer diplomasi formal sepanjang hal tersebut dilakukan untuk mencerminkan kehendak rakyat melalui perwakilannya. APPF juga mendorong pendirian grup persahabatan parlemen atau yang sejenis antar-parlemen untuk mempromosikan pertukaran praktik cerdas terutama dalam hal keparlemenan dan politik. APPF juga berkehendak untuk menyampaikan perspektif keparlemenan dalam kerja-kerja institusi multilateral seperti PBB, G-20, APEC hingga ASEAN.

### The Situation on the Korean Peninsula

APPF mendesak Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan tidak melakukan lagi tes nuklir atau meluncurkan rudal balistik dan untuk meninggalkan seluruh senjata nuklir serta program nuklir yang ada. APPF juga meminta Negara anggota untuk mengafirmasi kembali pentingnya kawasan Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir demi perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk Asia Pasifik. APPF mengkonfirmasi bahwa proses *Six-Party Talks* adalah kerangka kerja yang efektif sebagai solusi damai dari masalah nuklir di Semenanjung Korea, dan mengimbau seluruh pihak untuk melanjutkan *Six Party Talks*.

### Energy Cooperation, Energy Security Dialogue and Energy Efficiency

APPF memahami bahwa keamanan energy merupakan bagian penting dari isu global dan bahwa pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup hanya dapat dijaga dengan ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan suplai komoditas sumber daya dan energi. APPF juga menyadari bahwa berdasarkan fakta ekonomi negara-negara Asia Pasifik, kawasan tersebut merepresentasikan porsi besar dari permintaan energi dunia dan bahwa kawasan tersebut adalah importir murni energi. APPF mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan publik yang mendorong kerja sama regional, tukar menukar pengalaman, teknologi, dan kapital serta penggunaan energi hijau dan terbarukan, dan investasi yang lebih besar dalam sektor energi. APPF juga merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan upaya mereka dalam mendorong efisiensi energi, termasuk dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam implementasi menuju efisiensi energi yang dimungkinkan secara ekonomi dan tersedia melalui teknologi.

### Trade and Economic Cooperation in Asia Pacific

APPF mengimbau seluruh Negara untuk terus melaksanakan kebijakan-kebijakan fiscal dan keuangan yang efektif untuk merespon risiko penurunan dan memastikan stabilitas ekonomi dan pekerjaan, serta mempertimbangkan melalui berbagai forum-forum internasional langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menciptakan berbagai mekanisme

pengamanan dan sistem peringatan dini baik regional maupun global untuk merespon kemungkinan risiko finansial. APPF juga mendukung peran penting yang WTO lakukan melalui dorongan dan penguatan sistem perdagangan multilateral dan konklusi secepatnya dari Doha Development Round. Mendorong Negara anggota APPF untuk berpartisipasi aktif dalam proses membentuk perjanjian perdagangan bebas, penghapusan hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan, perbaikan iklim investasi, integrasi ekonomi, serta menjalin kerja sama dengan Parliamentary Conference on the WTO untuk memfasilitasi penyampaian dimensi keparlemenan terhadap sistem multilateral.

#### *Developing Transport Infrastructure in Asia Pacific*

Menyetujui komitmen para Pemimpin APEC untuk mencapai target perbaikan 10% atas kinerja rantai pasokan pada 2015, dalam konteks pengurangan waktu, biaya dan ketidakpastian perpindahan barang dan jasa di kawasan, dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi masing-masing negara. Memahami bahwa pembangunan rute-rute pasokan yang memadai akan memberikan manfaat dalam penguatan integrasi ekonomi regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik. Mendorong pemerintahan masing-masing untuk bergerak maju bersama-sama dalam menyiapkan logistik-logistik transportasi dan rencana infrastruktur yang mampu untuk mengarahkan beragam kepentingan dari negara anggota dan pada saat yang sama mendukung pembangunan berkelanjutan dengan keterbukaan dan integrasi regional yang lebih tinggi. APPF juga mendukung rekomendasi-rekomendasi yang dibuat pada saat Special Transportation Ministerial Meeting yang digelar pada Agustus 2012 di St. Petersburg Russia untuk melanjutkan upaya menggali peluang-peluang bersama dengan industri dan stakeholder terkait dalam diversifikasi dan maksimalisasi transportasi dan rute rantai-pasokan dalam berbagai bentuk, meningkatkan konektivitas rantai-pasokan, mendirikan jaringan informasi logistik, melengkapi seluruh elemen rantai-pasokan dengan teknologi pintar.

#### *Intensive Cooperation for Insuring the Innovative Growth*

APPF mencatat bahwa *2010 APEC Leaders Growth Strategy* menekankan pada pentingnya berkontribusi dalam pertumbuhan yang inovatif melalui peningkatan iklim Penelitian dan Pengembangan/Pembangunan (Litbang) dan secara efektif menyediakan kebijakan dan infrastruktur regulasi yang kondusif terhadap inovasi. APPF juga berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong inovasi, kepemimpinan, pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan perluasan usaha. APPF mendukung berbagai format kerja sama antarpemerintah, ilmuwan, dan kalangan bisnis yang bertujuan mendorong inovasi dan memperhatikan isu yang memberi dampak spesifik terhadap inovasi teknologi, termasuk format baru *APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation*, terus berlanjut dalam kerangka kerja *APEC Life Sciences Innovation Forum and The Innovation Technology Dialogues*. APPF juga mendorong berdirinya lembaga eksekutif dari kerja sama riset regional yang mengumpulkan dalam periode tahunan ilmuwan dan penasihat-penasihat ilmiah dari negara anggota untuk mendorong arus informasi dan pembelajaran dari praktik-praktik yang berhasil di negara anggota lainnya.



### *Food Security Cooperation in Asia Pacific*

Memahami tantangan yang berkembang terkait ketahanan pangan regional dan global, dan mengingatkan rentannya Negara-negara di Asia Pasifik terhadap bencana alam dan perubahan iklim, APPF mendorong upaya internasional dan regional dalam mengatasi tantangan-tantangan ketahanan pangan di Asia Pasifik sebagai kunci pertumbuhan regional berkelanjutan dan member semangat pada determinasi para pemimpin APEC, yang tercermin dalam KTT Vladivostok, untuk mengembangkan infrastruktur pasar pangan, mengurangi kerugian pascapanen bersama dengan seluruh rantai suplai pangan, memastikan pasar yang adil dan terbuka, mengurangi perubahan harga, dan mewujudkan ketahanan pangan regional dan global yang lebih besar, termasuk saat situasi darurat. APPF juga merekomendasikan pemerintah untuk mendukung kerja sama teknis, keilmuan dan teknologi, untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas pertanian di kawasan termasuk melalui koordinasi yang lebih baik, interaksi dan pengembangan kapasitas antarlembaga riset dan pusat-pusat inovasi dan jaringan regional.

### *Dialogue among Civilizations, Cultural Promotion, Educational and Humanitarian Contacts, Youth Policy Harmonization, Migratory Processes*

Memahami bahwa keragaman dan pertukaran budaya sebagai basis kesepahaman di antara bangsa-bangsa, lingkungan dan komunitas sebagai sebuah fakta kehidupan global yang dapat memainkan peran utama dalam meningkatkan ikatan sosial di antara berbagai bangsa, lingkungan dan grup etnis. Memperhatikan beragam inisiatif global melalui UN Alliance of Civilization atau Parliamentary Event on Interfaith Dialogue yang bertujuan untuk memobilisasi upaya terpadu di level kelembagaan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesepahaman dan hubungan kerja sama di dalam dan antara bangsa-bangsa, parlemen-parlemen dan masyarakat beragam budaya dan agama, APPF mengimbau Negara anggota untuk bekerja bersama secara kolaboratif dengan UNESCO, UN Alliance of Civilization maupun organisasi-organisasi transnasional pemuda dalam mendukung *people-to-people contact* melalui pemuda, akademisi dan pertukaran pemuda dan memanfaatkan kecerdasan dan kemampuan pemuda dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan studi peradaban di kawasan. APPF juga membangun kesadaran akan *the World Interfaith Harmony Week* yang diluncurkan melalui Resolusi Sidang Umum PBB A/RES/65/5 sebagai salah satu sarana mempromosikan harmoni antara masyarakat terlepas dari agama-agama yang dianut. APPF juga mendukung legislasi yang mengakui sertifikasi mutu sekolah dan ijazah sekolah/universitas di antara Negara anggota di kawasan.

### *Regional Cooperation in Youth Policies in Asia Pacific*

APPF mengkonfirmasi komitmen dari tujuan-tujuan *The World Programme of Action for Youth* yang disetujui PBB pada 1995, yang mengkonsolidasikan kerangka kerja kebijakan-kebijakan dan aksi-aksi dasar dari Negara-negara, dukungan untuk itu dari komunitas dunia untuk meningkatkan taraf hidup generasi yang lebih muda, mendukung *Lisbon Declaration on Youth Policies and Programmes* yang disetujui pada World Conference of Ministers responsible for Youth di Lisbon, Portugal pada 1998. APPF mendorong harmonisasi lebih

lanjut kebijakan kepemudaan dalam legislasi nasional termasuk pada wilayah pendidikan kepemudaan dalam semangat saling menghormati, saling bertoleransi, menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan lebih jauh lagi hak-hak pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lainnya. APPF merekomendasi parlemen dan pemerintah anggota APPF untuk memberikan upaya menciptakan "kenaikan status sosial" bagi pemuda melalui cara-cara yang dimungkinkan termasuk mengorganisir lembaga kepemudaan tetap konsultatif dan advokatif seperti parlemen pemuda, majelis atau forum di bawah otoritas lokal, regional maupun nasional untuk member ruang kepada pemuda kemungkinan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kepemudaan.

#### *Scientific and Educationl Cooperation in Asia Pacific*

APPF mengakui bahwa wilayah pendidikan dan keilmuan adalah landasan pembangunan inovasi dan kemakmuran ekonomi dari Negara-negara Asia Pasifik. APPF merekomendasikan parlemen Negara anggota untuk mendukung harmonisasi legislasi-legislasi nasional yang terkait pendidikan dan keilmuan. APPF juga merekomendasikan untuk mendukung inisiatif Rusia dalam kerja sama keilmuan dalam konteks riset di kawasan Asia Pasifik dalam basis multilateral sejalan dengan *Declaration of the APEC Research Funding Agencies* yang disetujui di Vladivostok, 11 Mei 2012. APPF mendorong pembangunan jaringan kerja sama lembaga-lembaga riset dan pembentukan jaringan universitas-universitas dan pusat-pusat laboratorium di kawasan Asia Pasifik.

#### *Cooperation on Disaster Prevention, Disaster Management and Environmental Protection*

APPF sadar akan tanggung jawab Negara dalam melindungi warganya dan juga sumber daya alam dengan mengurangi risiko kerugian dari bencana. APPF juga sadar adanya konsekuensi besar dalam penundaan masuknya pasokan bantuan dan personel berkeahlian yang dibutuhkan untuk tanggap bencana secara efektif. APPF juga mempertimbangkan *the Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015* diadopsi di Kobe, Hyogo, Jepang sebagai cetak biru yang sistematis dan strategis sebagai panduan upaya-upaya nasional dan internasional dalam mengurangi kerentanan dan risiko yang dipaksa dari munculnya bencana alam dan buatan manusia. APPF mengimbau seluruh Negara anggota untuk mengurangi kerentanan terhadap manusia dengan meningkatkan landasan hukum mereka untuk bencana-bencana termasuk dengan memfasilitasi langkah-langkah tanggap bencana yang tepat waktu dan efektif dan mendukung aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Selain menghasilkan 14 resolusi di atas, Sidang Tahunan ke-19 APPF juga menghasilkan sebuah *Joint Communique* yang merupakan rangkuman dari semua agenda yang dibahas termasuk ringkasan dari resolusi yang telah disahkan.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Sidang Tahunan ke-21 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* yang diselenggarakan pada tanggal 27-31 Januari 2013 di Rusia berlangsung dengan lancar, aman dan sukses.
- b. Sidang Tahunan ke-21 APPF berhasil mengadopsi 14 Resolusi dan *Joint Communiqué* serta *Final Statement of the Participants of the Asia Pacific – Europe: New Horizons of Co-operation Round Table Discussion* dan *Message from the Participants in the Meeting of Young Parliamentarians from the Asia-Pacific region*. Lima resolusi diantaranya merupakan usulan Indonesia.
- c. Disepakati bahwa Parlemen Meksiko menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan ke-22 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* tahun 2014.
- d. Delegasi Parlemen RI menghadiri semua persidangan sesuai agenda dan program yang telah ditetapkan. Delegasi Parlemen RI berpartisipasi dan berperan aktif dalam perdebatan dan turut memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan melalui *statement/intervention/draft resolution* yang disampaikan secara tertulis maupun lisan selama persidangan.
- e. Sidang Tahunan ke-21 APPF diwarnai dengan format baru pertemuan yang melibatkan berbagai kalangan dan pemangku kepentingan seperti organisasi-organisasi antarparlemen, dan perwakilan pemuda. Dua format baru pertemuan yakni Round Table Discussion serta Meeting of the Young Parliamentarians disepakati untuk ditindaklanjuti secara reguler dalam setiap pertemuan tahunan APPF.
- f. Keanggotaan Executive Committee yang berasal dari subregion Asia Tenggara mengalami perubahan per Mei 2013 seiring dengan rotasi keanggotaannya. Indonesia disepakati menjabat kembali selama dua tahun ke depan, sedangkan Kamboja menggantikan Malaysia sebagai anggota Executive Committee untuk masa jabatan empat tahun.

## **B. Saran**

- a. Terkait rotasi keanggotaan di *Executive Committee*, yang menghasilkan keputusan Kamboja sebagai anggota *Executive Committee* baru dari subregion Asia Tenggara, DPR RI perlu melakukan pertemuan informal sub region pada APPF ke-22 di Meksiko dalam upaya memperkuat posisi Asia Tenggara di *Executive Committee* sekaligus mempererat hubungan persahabatan parlemen di Asia Tenggara.
- b. Mengingat peran Indonesia yang semakin vital di kawasan, Delegasi DPR RI diharapkan dapat semakin aktif memperjuangkan kepentingan nasional demi tercapainya stabilitas dan kerja sama yang sehat di kawasan Asia-Pasifik. Delegasi DPR-RI juga diharapkan semakin berperan dan memberikan kontribusi nyata dalam

menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan global di kawasan dengan pedoman kepentingan nasional Indonesia.

- c. Indonesia pada tahun 2013 menjadi tuan rumah APEC, maka, secara tradisi Parlemen negara tuan rumah APEC memiliki kewajiban melaporkan penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam sesi pleno ekonomi APPF tahun berikutnya. Dengan demikian, DPR RI memiliki kewajiban menyampaikan laporan APEC 2013 pada APPF ke-22 di Meksiko tahun 2014. DPR RI perlu untuk menyiapkan secara matang dan menyeluruh laporan penyelenggaraan APEC 2013.
- d. Pada penyelenggaraan APPF ke-22 di Puerto Vallarta tahun 2014. Delegasi DPR RI kiranya dapat menitikberatkan isu-isu ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Pertimbangan ini mengingat bahwa APEC 2013 dan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali baru selesai diselenggarakan pada akhir tahun 2013, sehingga diharapkan APPF dapat menyuarakan kontinuitas atas hasil-hasil yang telah dicapai pada APEC dan WTO pada tahun 2014.
- e. Pada penyelenggaraan APPF ke-22 di Meksiko, DPR RI juga diharapkan telah memberikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan resolusi-resolusi yang diajukan oleh Indonesia untuk diadopsi pada APPF ke-21. Laporan tertulis selambat-lambatnya diberikan kepada tuan rumah APPF ke-22 dua bulan sebelum waktu penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 *New Rules of Procedure of APPF*.
- f. Beberapa format baru pertemuan yang diinisiasi Rusia dan melibatkan *stakeholder* baru seperti para pemuda dan anggota parlemen muda diapresiasi dengan baik oleh DPR RI. Mempertimbangkan rencana pertemuan secara reguler dari para anggota parlemen muda negara-negara Asia Pasifik di setiap pertemuan Tahunan APPF, DPR RI perlu mengikutsertakan anggota parlemen berusia muda dalam pertemuan *young parliamentarians* tersebut.
- g. Hal yang perlu ditindaklanjuti dari pertemuan bilateral dengan Rusia yang dipimpin oleh Wakil Ketua Duma, **Mr. Zheleznyak Sergey**, dan delegasi DPR RI yang dipimpin oleh **Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM**, Wakil Ketua DPR RI, adalah permintaan dukungan dari Rusia atas prakarsa Rusia untuk menjadi tuan rumah World EXPO 2020 di Ekaterinburg, ibukota dari Negara bagian Ural. Apabila pemerintah Indonesia belum memberikan komitmen untuk mendukung Negara tertentu, kiranya permintaan Rusia ini dapat dipenuhi mengingat hubungan dua negara yang cukup baik.

## IV. PENUTUP

### A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 9 (sembilan) Anggota, 1 (satu) Sekretaris Ketua Delegasi, 2 (dua) Sekretaris Delegasi, 1 (satu) Tenaga Ahli, 2 (dua) Penterjemah, dan 2 (dua) wartawan adalah Rp 1.893.655.000,-.

### B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- Report of Executive Committee Meeting
- *Joint Communiqué*
- *Resolutions*
- *Final Statement of the Participants of the Asia Pacific – Europe: New Horizons of Co-operation Round Table Discussion*
- *Message from the Participants in the Meeting of Young Parliamentarians from the Asia-Pacific region*
- *List of Participants*
- Dokumentasi Foto

### C. PENUTUP

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Parlemen RI ke Sidang Tahunan ke-21 APPF yang berlangsung pada tanggal 27 – 30 Januari 2013 di **Vladivostok**, Rusia. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 Februari 2013

Ketua Delegasi/Wakil Ketua DPR RI,

Ttd.

**Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM**

A - 384